



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul

: Yang terlibat online scan di Kamboja kembali dipulangkan, WNI, korban eksploitasi atau bagian dari sindikat?

Tanggal

: Selasa, 03 Februari 2026

Surat Kabar

: Rakyat Merdeka

Halaman

: 2

Yang Terlibat Online Scam Di Kamboja Kembali Dipulangkan

WNI, Korban Eksploitasi Atau Bagian Dari Sindikat?

Sebagian 36 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sektor Online Scam Di Kamboja (Survei) tiba di Kamboja, Jumat (30/1/2026). Kedatangan mereka pun menimbulkan perbedaan pandangan, apakah mereka korban atau bagian dari jejeran sindikat.

Para WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat (30/1/2026) pagi. Kedatangan mereka sama Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Phnom Penh. "Selainnya di Tanah Air, mereka

langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut segera setibanya di Yonmek," kata Jubir I Kemenlu Yvonne Mewengkang, dikutip dari RRI.

"Yvonne menjelaskan, pemulangan ini merupakan pemulangan WNI gelombang pertama dari Kamboja pada tahun 2026.

Untuk itu, Kemlu kembali mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi dan patuh peraturan yang berlaku agar mampu bekerja di luar negeri. "Menata seluruh peraturan keimigrasian negara setempat," ujarnya.

Yvonne menyebut, Kemlu RI akan terus memantau perkembangan situasi di Kamboja dan koordinasi dengan pihak berwenang. Upaya ini dimaksudkan untuk memulangkan seluruh WNI dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi," kata Jubir Kemlu RI.

Adapun berdasarkan data KBRI Phnom Penh jumlah WNI yang melaporkan berhasil keluar dari sindikat penipuan dari Kamboja pada hari ini, Minggu (28/1/2026) sekitar 2.752. WNI telah datang ke KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan kepolisian ke Indonesia. Untuk memfasilitasi kepulangan

para WNI, telah dipercepat proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki. Upaya ini dipadukan dengan dukungan tim pertambahan teknis kedua dari Ditjen Imigrasi, yang tiba di Phnom Penh Rabu, 28 Januari 2026.

Terkait polemik status para WNI tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan, meski negara wajib melindungi, kejelasan status antara korban atau pelaku harus dituliskan agar proses hukum yang transparan.

"Peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum secara

berimbang," ujar Dave Rakyat Merdeka, Minggu (1/2/2026).

Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persada berpendapat, pemulangan saja tidak cukup tanpa asesmen forensik digital.

"Pemerintah perlu melihat ini sebagai pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan domestik yang lebih luas," tegas Pratama kepada Rakyat Merdeka, Senin (2/2/2026).

Untuk itu, berdasarkan sampaikan dari Dave Laksono dan Pratama Persada terkait WNI terlibat online scam di Kamboja, berikut wawancaranya.

DAVE LAKSONO,
Wakil Ketua Komisi I DPR

Negara Wajib Lindungi, Jangan Berhenti Hukum Tetap Berjalan

Foto: istimewa/republika

Ebagaimana Anda melihat kependidikan dan perlindungan korban online scam yang dilakukan oleh kegiatan online scanning?

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada. Kedatangan mereka harus dipandang dengan penuh kehati-hatian.

Apakah mereka semua bisa dianggap sebagai korban?

Siapa mereka, apakah sepenulihnya korban eksploitasi atau terlibat sebagai pelaku, masih memerlukan bukti yang bukti bahwa sebagian besar mereka aktif sebagai korban kejahatan, maka proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil.

Bagaimana Anda menanggapi pro-kontra di masyarakat mengenai perlindungan korban online scam?

Pro kontra adalah hal yang wajar.

Ada yang melihat mereka sebagai korban perlindungan manusia dan ada yang melihat mereka sebagai bagian dari jaringan kriminal. Justru di sinilah peran negara untuk menghindari korban kriminal ini yang sesederhana hitam dan putih, karena ekosistem kejahatan digital berkarya dengan model berpasip.

Apakah ada mekanisme khusus yang dilakukan oleh negara?

Kita mendengar peringatan sistem peringatan dini terhadap potensi eksploitasi WNI di sektor-sektor tertentu. Misalnya sektor teknologi pengawasan manusia diperketat. Sebagai wakil rakyat, saya menekankan pada pentingnya pengamanan teknologi siber. Komite Profil publik tidak terlepas dalam spekulasi.

Langkah apa yang diperlukan oleh Komisi I DPR untuk mencegah kasus serupa?

Kami menekankan pentingnya

memperkuat aspek diplomasi dan kerja sama internasional dengan tujuan agar mekanisme perlindungan WNI lebih efektif. Kami mendorong Pemerintah, khususnya Kemenlu, untuk berkoordinasi erat dengan otoritas negara mitra.

Bagaimana Anda melihat fenomena pengembangan WNI perjalanan di dunia dan perlindungannya?

Tentu ini kompleks membutuhkan perbedaan klasik antara narasi korban dan pelaku. Dalam konteks kejadian ini, kita lihat bahwa pelaku ini jarang sesederhana hitam dan putih, karena ekosistem kejahatan digital berkarya dengan model berpasip.

Boleh dijelaskan lebih lanjut?

Indonesia yang terbuka bersama-sama pada teknologi membuat kita mudah dari korban persekutuan, operator teknis tingkat rendah, hingga bagian dari jaringan terorganisir dengan peran strategis.

Setelah sebagian dipulangkan, apa langkah penting yang harus dilakukan?

Langkah Pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemulangan semata. Yang jauh lebih krusial adalah

proses asesmen komprehensif berbasis intelijen dan forensik digital.

Apakah yang perlu diperiksa dari teknis digital mereka?

Pemerintah harus melakukannya dengan asumsi, tapi bagaimana Anda melihatnya?

Langkah tersebut sangat strategis. Humanis dipertahankan untuk melindungi korban, tetapi juga manusia lain yang memberikan informasi penting guna memetakan jaringan. Di sisi lain, kejadian ini juga memberikan pelajaran bagi mereka yang terbukti beroperasi aktif. Humanis bukan berarti permisif.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono, mengatakan bahwa korban humanis namun tetap rasis dalam kasus ini, bagaimana Anda melihatnya?

Langkah tersebut sangat strategis.

Humanis dipertahankan untuk melindungi korban, tetapi juga manusia lain yang memberikan informasi penting guna memetakan jaringan. Di sisi lain, kejadian ini juga memberikan pelajaran bagi mereka yang terbukti beroperasi aktif. Humanis bukan berarti permisif.

Apakah rekomendasi jangka panjang agar kasus ini tidak terulang?

Harus diikuti perbaikan sistem pengamanan siber. Literasi digital, pengembangan perekonomian kreatif, serta rehabilitasi. Tanpa itu, Indonesia akan selalu menjadi target bagi korban.

Kasus ini harus jadi momentum negara hadir secara cerdas di ruang siber. ■ NNM